

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sampai saat ini kondisi perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya pulih. Pemerintah telah bertekad untuk melakukan segala langkah dan kebijakan strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proposional. Komitmen tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Sebagai wadah pengembangan usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana lembaga bisnis lainnya. Didalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan satu hak yang harus ada demi terwujudkan tujuan yang harus diharapkan. Sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas kekeluargaan, koperasi harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan, bertanggung jawab (*accountability*) dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama.

Perkembangan koperasi tidak terlepas dari berbagai sarana dan usaha-usaha kerjasama dengan pihak yang memiliki kekuasaan karena untuk mengelola suatu badan usaha banyak tantangan yang dihadapi. Perkembangan perekonomian

yang cenderung liberalisme membuat koperasi semakin sulit untuk tumbuh lebih maju. Oleh sebab itu koperasi tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menangani usahanya. Semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsi masing-masing dalam serentetan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan.

Untuk menjaga kesinambungan koperasi harus dilakukan pengendalian manajemen yang memadai agar perusahaan terhindar dari kemungkinan yang merugikan seperti kecurangan dalam pelaksanaan tugas. Pengendalian manajemen yang sesuai dengan koperasi mulai dari pembentukan struktur organisasi, praktek yang sehat dan tersedianya karyawan yang tanggap dalam bidangnya. Pengendalian manajemen dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya ketidakefektifan dan memperoleh informasi mengenai hasil operasi, apakah pelaksanaan tugas setiap bagian menyimpang dari yang direncana atau tidak.

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasi problema-problema manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasi problema-problema merupakan tantangan bagi para manajer. Seorang manajer akan menyadari suatu problema apabila terjadi penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai. Salah satu fungsi daripada manajemen adalah pengendalian.

Dengan berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar manajemen koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Manajemen yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban

yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari prosedur pemberian kredit dan kolektibilitas piutang.

Koperasi kredit memiliki aturan-aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam pemberian kredit. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit bermasalah dapat mengakibatkan kesulitan bagi koperasi karena tertahan modal sehingga sulit untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban koperasi. Akibatnya dalam kehidupan praktik tidak sedikit koperasi yang tutup karena banyaknya jumlah kredit bermasalah.

Penerapan prosedur pemberian kredit dan kolektibilitas piutang yang baik dapat menghindari kesalahan, kecurangan, dan sangat mempengaruhi tujuan yaitu laba. Piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang mudah dimanipulasi, dan sering juga tidak dibayar tepat waktu sehingga harus dilakukan kolektibilitas terhadap piutang, bahkan harus melakukan penghapusan piutang yang tak tertagih. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang.

Kolektibilitas piutang merupakan tingkat kemampuan pengembalian pokok pinjaman dan bunganya. kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengendalian manajemen yang baik diharapkan dapat mengurangi kredit bermasalah dan berpengaruh positif terhadap pengembalian pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Gunungsitoli berkedudukan di Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, telah disahkan dan ditetapkan di Medan pada tanggal 20 November 2002 dengan Badan Hukum : No.26/BH/KWK-2/XI/2002. KSP3 Nias memiliki dua kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (kredit). Dana yang dihimpun oleh KSP3 Nias berasal dari simpanan anggota yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.

Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kredit yang diberikan kepada anggota harus dapat dipertanggungjawabkan pengembaliannya karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang diperoleh. Apabila kredit yang diberikan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah membahas mengenai kredit macet yang terdapat pada KSP3 Nias Cabang Gunungsitoli serta jumlah pengembalian piutang selama periode 2016. Dalam KSP3 Nias Cabang Gunungsitoli besarnya jumlah kredit yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah pengembalian piutang yang diterima sesuai waktu jatuh tempo. Hal ini diketahui dari terdapatnya kredit macet selama periode tahun 2016 yang berakhir pada bulan desember.

Tabel 1.1 ini merupakan daftar kredit yang disalurkan dan kredit bermasalah dan kolektibilitas piutang selama 1 tahun terakhir :

Tabel 1.1
Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias
Cabang Gunungsitoli
Daftar Kredit Disalurkan, Kredit Bermasalah, Pengembalian Piutang
Per 31 Desember 2016

No	Bulan	Kredit yang Disalurkan	Kredit Bermasalah	Pengembalian Piutang
1	Saldo awal	Rp 15.118.461.250	-	-
2	Januari	Rp 14.558.771.083	Rp 478.206.000	Rp 1.716.667.167
3	Februari	Rp 15.272.498.083	Rp 753.994.583	Rp 1.514.431.000
4	Maret	Rp 16.072.922.500	Rp 1.355.467.000	Rp 1.435.076.000
5	April	Rp 16.210.478.000	Rp 1.179.405.000	Rp 1.444.024.500
6	Mei	Rp 16.496.344.780	Rp 663.525.000	Rp 1.602.383.220
7	Juni	Rp 17.221.625.613	Rp 1.012.750.000	Rp 1.536.228.033
8	Juli	Rp 17.000.551.946	Rp 768.211.000	Rp 1.808.313.667
9	Agustus	RP 17.293.505.279	Rp 599.210.000	Rp 1.941.306.667
10	September	Rp 17.821.723.362	Rp 921.975.000	Rp 1.409.931.917
11	Oktober	Rp 19.203.241.195	Rp 273.730.000	Rp 1.411.332.167
12	November	Rp 19.668.395.665	Rp 378.640.000	Rp 1.827.245.280
13	Desember	Rp 18.331.274.498	Rp 630.880.000	Rp 2.642.246.167
14	Total	Rp 220.269.793.254	Rp 9.015.993.583	Rp 20.289.185.785

Sumber : KSP3 Nias Cabang Gunungsitoli

Catatan : Dari daftar tabel tersebut diketahui total kredit yang disalurkan selama tahun 2016 sebesar Rp 220.269.793.254, total kredit bermasalah sebesar Rp 9.015.993.583 dan total pengembalian piutang sebesar Rp 20.289.185.785. Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat kolektibilitas piutangnya pada tahun 2016 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan, dan diketahui masih terdapat kredit bermasalah pada tahun 2016. Kredit bermasalah tersebut diketahui dari pinjaman anggota yang tidak membayar bunga pinjaman maupun angsuran pinjamannya selama minimal 3 (tiga) bulan.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang disalurkan oleh koperasi tetapi anggota tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah

ditandatangani oleh koperasi dan anggota. Adanya kredit bermasalah setiap bulannya menjadikan koperasi harus lebih berhati-hati dalam meningkatkan kebijakan dalam pemberian kredit kepada anggota serta kebijakan terhadap penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Hal ini merupakan indikator dalam melihat tingkat pengembalian piutang melalui pengendalian manajemen yang efektif. Dengan adanya pengendalian manajemen dalam penagihan piutang diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pengendalian Manajemen Terhadap Kolektibilitas Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Gunungsitoli”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah sehubungan dengan judul tersebut yaitu apakah terdapat pengaruh pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Gunungsitoli?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian manajemen berpengaruh

terhadap kolektibilitas piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Gunungsitoli.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang.

b. Bagi Koperasi

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang.

c. Bagi Peneliti lainnya

Menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa di kemudian hari.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi Simpan Pinjam

2.1.1 Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Menurut pasal 1 UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyajikan pengertian koperasi sebagai berikut :

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.¹

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-u6crcDXAhVHurwKHU1HBx0QFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fyogyakarta2.kemenag.go.id%2Ffiles%2Fyogyakarta%2Ffile%2Ffile%2Feffi%2Fgwae1394682340.pdf&usg=AOvVaw1F9n-jtCz5Wm2PdnGj8ZJO>, pasal 1, hal. 2

2.1.2 Peranan Koperasi

Dalam kegiatannya koperasi bukan sekedar usaha yang mengandalkan tingkat prestasi individual orang-orang dimana keuntungan adalah hasil gunadari mereka yang terlibat dalam kegiatan usaha melainkan merupakan usaha bersama untuk menuju kesejahteraan bersama. Pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggungjawab moral dan sosial. Menurut Sutantya peran koperasi dapat diuraikan sebagai :

1. **Koperasi Indonesia berupa ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.**
2. **Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran dan dapat megembangkan kegiatan usaha masyarakat.**
3. **Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.**
4. **Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.**
5. **Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pejuang ekonomi.²**

2.2 Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus Oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

² Sutantya Rahardja Hadhikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 40.

Menurut Rusli Siahaan: **“Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan dengan menggunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”**³

Dan menurut Stephen dan Mary: **“Manajemen merupakan aktivitas yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.”**⁴

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen melibatkan tanggung-jawab memastikan pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara efisien dan efektif oleh orang-orang yang bertanggung-jawab untuk melakukannya hal tersebut. Efisiensi merujuk pada maksud mendapatkan sebesar-besarnya output dari sekecil-kecilnya input, sedangkan Efektif merupakan tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan. Inilah yang idealnya dijalankan oleh seorang manajer.

Menurut Stephen dan Mary: **“Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai”**.⁵ tanggung jawab utamanya melaksanakan proses manajemen. Pekerjaan seorang manajer bukanlah menyelesaikan tugas-tugasnya pribadi, melainkan berupaya membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik.

³ Rusliaman Siahaan, et all, **Manajemen**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2015, hal. 2.

⁴ Stephen dan Mary, **Manajemen**: Edisi Kesepuluh, Jilid satu, Erlangga, Jakarta, 2010, hal.7.

⁵ **Ibid.**, hal 6

Fifi Hasmawati Mengemukakan :

“Berfikir secara manajemen adalah berfikir untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala apa (faktor-faktor, sumber-sumber daya) yang menurut perencanaan (*planning*) diperlukan untuk menyelesaikan atau mencapai suatu prapta (*objective*) atau tujuan (*goal*) yang tertentu”.⁶

Aktivitas dasar dari proses manajemen adalah perencanaan dan pengambilan keputusan seperti menentukan arah tindakan, pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan aktivitas dan sumber daya, kepemimpinan yaitu memotivasi dan mengatur orang, dan pengendalian yaitu memonitor dan mengevaluasi aktivitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dapat muncul secara informal dari suatu kelompok dan dapat juga ditunjuk secara formal.⁷

Manajer memiliki sepuluh peran dasar untuk dilakukan yaitu :

1. **Tiga peran informasional yaitu peran pemantau, peran penyebar informasi dan peran juru bicara.**
2. **Tiga peran antar pribadi, yaitu peran figur kepala, peran pemimpin, dan peran penghubung.**
3. **Empat peran keputusan, yaitu kewirausahaan, menangani gangguan, mengalokasikan sumber daya, dan juru runding.**⁸

Manajer yang efektif cenderung memiliki keahlian teknis, interpersonal, konseptual, diagnostik, komunikasi, pengambil keputusan dan manajemen waktu. Proses manajemen dapat diterapkan dalam banyak organisasi termasuk organisasi pencari laba dan organisasi nirlaba.

⁶ Fifi Hasmawati., **Manajemen Koperasi**: Duta Azhar, Medan, 2013, hal. 21.

⁷ M.N Nasution., **Manajemen Mutu Terpadu**: Edisi Kedua : Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 201.

⁸ Rusliaman Siahaan, **Op. Cit.**, hal. 9.

Fungsi manajemen menurut Mas'ud dan Mahmudi terdiri dari: “**Fungsi Perencanaan (*planning*), pengarahan (*directing*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan staf (*staffing*) pengendalian (*controlling*) dan pengambilan keputusan (*decision making*)”⁹.**

1. Perencanaan adalah suatu proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan.
2. Pengarahan adalah pengarahan terhadap para karyawan, mereka diarahkan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pengurus yaitu manajer yang akan menangani dan mengawasi kalau ada penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh para karyawan.
3. Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana suatu organisasi.
4. Pengendalian adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran-sasaran perencanaan.
5. Pengambilan Keputusan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang ditunjukkan pada pencapaian tujuan tertentu.

2.2.1 Pengertian Perencanaan dan Pengendalian Manajemen

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam nama dikembangkan suatu

⁹ Mas'ud dan Mahmudi, **Akuntansi Manajemen**, Edisi Pertama, Cetakan Keenam: Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hal 1.3.

kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan.

Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan saran apa yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau sasaran adalah penting bagi setiap organisasi karena:

- a. **Tujuan dan sasaran bersifat memberikan arah.**
- b. **Tujuan dan sasaran akan memfokuskan usaha kita.**
- c. **Tujuan dan sasaran menjadi pedoman bagi penyusun rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternatif-alternatif keputusan.**
- d. **Tujuan dan sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai.**¹⁰

Proses sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dilaksanakan mulai dari:

- a. Sistem perumusan strategi

Dalam tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro, lingkungan industri, dan lingkungan persaingan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tren tersebut kemudian dilakukan SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*) analysis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan luar perusahaan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan.

- b. Sistem perencanaan strategik

Setelah perusahaan merumuskan strategi pilihan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut dilaksanakan melalui sistem perencanaan

¹⁰ Hendrojogi, **Koperasi Asas-asas Teori dan Praktek**, Edisi Keempat, Cetakan Keenam: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 138.

strategik. Dalam langkah ini misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi organisasi yang telah dirumuskan tersebut diterjemahkan *company scorecard* berisi tentang ukuran, target, dan inisiatif strategik perusahaan secara keseluruhan.

c. Sistem penyusunan program

Adalah proses penyusunan rencana laba jangka panjang untuk menjabarkan inisiatif strategik pilihan guna mewujudkan strategik. Sistem penyusunan program merupakan proses pembanguan hubungan sebab-akibat antara rencana operasiaonal dengan rencana keuangan.

d. Sistem penyusunan anggaran

Adalah proses penyusunan laba dalam jangka pendek biasanya untuk jangka waktu setahun atau kurang yang berisi langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan dalam melaksanakan sebagian dari program.

e. Sistem pengimplementasian

Dilakukan setelah seluruh rencana menyeluruh selesai disusun. Dalam pelaksanaan tahap pengimplementasian rencana ini, manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam anggaran kedalam kegiatan nyata.

Proses pengendalian manajemen adalah proses dimana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan.

Pengendalian manajemen terdiri dari berbagai kegiatan :

a. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi.

- b. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
- c. Mengomunikasikan informasi.
- d. Mengevaluasi informasi.
- e. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada.

Pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Dengan adanya pengendalian juga dapat memungkinkan manajer untuk mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya dalam melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan menjadi jauh. Pengendalian memastikan aktivitas yang sebenarnya sesuai atau tidak dengan aktivitas yang direncanakan.

2.2.2 Jenis-jenis Pengendalian Manajemen

1. Pengendalian pencegahan (*preventive controls*)

Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Pengendalian pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atau personel melaksanakan perannya. Contoh pengendalian pencegahan meliputi: kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas dan pengendalian ganda.

2. Pengendalian deteksi (*detective controls*)

Sesuai dengan namanya pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian deteksi dibutuhkan dengan alasan: Pertama, pengendalian deteksi dapat mengukur

efektivitas pengendalian pencegahan. Kedua, beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi.

3. Pengendalian koreksi (*corrective controls*)

Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali.

4. Pengendalian pengarahan (*directive controls*)

Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

5. Pengendalian kompensatif (*compensating controls*)

Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian.

2.2.3 Ciri-ciri Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit Yang Efektif

Pengendalian Manajemen yang efektif dalam pemberian kredit kepada anggota koperasi apabila memenuhi kriteria :

1. Adanya Penilaian kredit

a. Adanya seleksi dalam pemberian kredit

Menurut Kasmir ada lima penilaian kriteria peminjam yaitu terdiri dari 5 C :

- ***“Character***
Adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

- **Capacity**
Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dengan mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam dalam mengembalikan kredit yang yang disalurkan.
- **Capital**
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- **Collateral**
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka dijamin yang ditipkan akan dapat dipertanggungjawabkan secepat mungkin.
- **Condition**
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.¹¹

b. Adanya persyaratan kredit

Persyaratan kredit adalah syarat pembayaran yang dibutuhkan bagi pelanggan. mencakup dua hal, yakni: Periode kredit (kapan penagihan dimulai

¹¹ Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 136.

serta berapa lama batas waktu penagihan), Besar bunga yang diberikan pada saat melakukan peminjaman.

2. Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit dimulai dengan kegiatan pengumpulan data dan analisis untuk mengetahui kendala atau peluang yang selanjutnya mendapat suatu kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat atau lebih tepat dalam mencapai tujuan.

Perencanaan kredit terdiri dari dua sub bab kegiatan yang antara lain adalah sub kegiatan pengembangan usaha, dan penerapan plafon kredit.

- Pengembangan usaha merupakan penjelasan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan usaha koperasi kredit.
- Penetapan plafon kredit merupakan penjelasan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menetapkan plafon kredit. Penetapan Plafon kredit bertujuan untuk mengoptimalkan pengoperasian dana kredit yang tersedia tanpa harus mengganggu posisi "*Cash Ratio*" yang merupakan cadangan untuk memenuhi atau menutupi kewajiban-kewajiban yang dapat timbul sewaktu-waktu.

3. Pengamanan Kredit

Pengamanan kredit merupakan aspek penting dalam manajemen kredit, karena proses pengamanan yang berjalan terus-menerus, dan mengaitkan suatu kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Tindakan pengamanan kredit dengan memberikan jumlah kredit yang sedikit pada banyak anggota adalah

lebih baik daripada memberikan kredit dalam jumlah banyak pada beberapa anggota. Tindakan pengamanan kredit akan lebih teknis yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kredit yang diberikan serta melakukan pembinaan terhadap para anggota.

Pengertian pengawasan kredit dan Pembinaan anggota yaitu :

- a. Pengawasan kredit merupakan penjelasan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit perlu dilakukan secara terus-menerus selama kredit tersebut berjalan agar permasalahan yang ada dapat terdeteksi sejak dini.
- b. Pembinaan anggota merupakan penjelasan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembinaan para anggota dalam masa kredit. Pembinaan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota maupun pemberi informasi yang berkaitan dengan usaha anggota.

2.3 Kolektibilitas Piutang

2.3.1 Pengertian Piutang

Piutang dagang atau disebut juga dengan piutang usaha merupakan piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang merupakan hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas dimasa yang akan datang, akibat kejadian dimasa lalu. Piutang menjadi tuntutan dari pihak lain (langganan) akibat perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dagang/jasa secara kredit. Dari definisi piutang diatas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah hak untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya

perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain atau menjual barang atau jasanya secara kredit kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.

2.3.2 Prosedur Pemberian Pinjaman

Proses pemberian pinjaman yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberian pinjaman kepada anggota. Suatu keharusan menilai kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memandu tim manajemen dalam melaksanakan pemrosesan pemberian pinjaman secara efisien berdasarkan metode pemrosesan pinjaman yaitu kemampuan mengembalikan pinjaman merupakan salah satu kunci manajemen kredit yang berhasil.

Menurut Kasmir: **“Prosedur pemberian pinjaman adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikuncurkan”**.¹²

Secara umum prosedur pemberian pinjaman oleh badan hukum sebagai berikut:

- 1. Pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan terdiri dari : pengajuan proposal hendaknya berisi latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, jaminan kredit.**
- 2. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk penyelidikan keabsahan berkas.**
- 3. Wawancara I, merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.**

¹² Ibid., hal. 143.

4. *On the spot*, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
5. Wawancara II , yaitu kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* dilapangan.
6. Keputusan kredit, merupakan penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: Jumlah uang yang diterima, Jangka waktu kredit, Biaya-biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit
7. Penandatanganan akad kredit, merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
8. Realisasi kredit.
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan.
9. Penyaluran dana .¹³

Menurut Taswan: **“Kredit yang diberikan digunakan untuk menampung semua persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain”**.¹⁴ Kredit tersebut mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali sesuai jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu merupakan waktu mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati
4. Resiko akibat adanya tenggang waktu.

¹³ Loc. Cit

¹⁴ Taswan, Op. Cit., hal. 26.

5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pendapatan atas pemberian suatu kredit.¹⁵

2.3.3 Pengertian Kolektibilitas

Istilah kolektibilitas bersal dari bahasa Inggris yaitu “*collectible*”, artinya “yang dapat ditagih”. Jadi kolektibilitas adalah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Menurut kamus bisnis dan bank: **“Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkaa dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya”**.¹⁶

Kredit yang diberikan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya oleh sebab itu perusahaan berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya. Definisi kolektibilitas adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Pembayaran angsuran kredit dikenakan pembebanan besarnya suku bunga kredit. Pembebanan maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya.

¹⁵ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan keenambelas: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 100

¹⁶ **Kamus Bisnis dan Bank**, <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx>, hal 1

Perusahaan yang memberikan jangka waktu kredit yang panjang cenderung memiliki jumlah piutang usaha yang relatif tinggi dibanding dengan perusahaan yang memberikan jangka waktu kredit yang pendek. Di dalam kedua situasi diatas sangat penting untuk menagih piutang secepat mungkin. Kas yang diperoleh dari penagihan piutang yang akan meningkatkan pendapatan dengan mengurangi resiko kerugian dari piutang tak tertagih.

2.3.4 Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat Kolektibilitas Piutang berdasarkan ketepatan pembayaran terdiri dari :

1. Kolektibilitas Lancar

Kolektibilitas Lancar yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik Pokok maupun Bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

Konsekuensi kolektibilitas lancar :

- Kartu dalam status aktif
- Kartu tidak terblokir

2. Kolektibilitas dalam Perhatian Khusus

Kolektibilitas dalam Perhatian Khusus yaitu pembayaran piutang yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong kolektibilitas dalam perhatian khusus apabila masih terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau sampai dengan 90 hari.

Konsekuensi kolektibilitas dalam Perhatian Khusus :

- Dikenakan biaya keterlambatan (jika ada)
- Kartu akan terblokir sementara untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan 59 hari. Di atas 60 hari, kartu akan terblokir permanen, kartu tidak dapat digunakan.
- Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dimulai.

3. Kolektibilitas Kurang Lancar

Kolektibilitas Kurang Lancar merupakan pembayaran piutang yang telah mengalami tunggakan. Dikatakan kurang lancar jika :

- a. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang 180 hari.
- b. Pada kondisi ini hubungan antara anggota dengan anggota memburuk.
- c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh koperasi.

Konsekuensi kolektibilitas kurang lancar :

- Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dilanjutkan
- Kartu terblokir secara permanen, kartu tidak dapat digunakan

4. Kolektibilitas Diragukan

Kolektibilitas Diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga. Digolongkan diragukan jika :

- a. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
- b. Pada kondisi ini hubungan antara anggota dengan koperasi semakin memburuk.

- c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya

Konsekuensi kolektibilitas diragukan :

- Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dilanjutkan
- Kartu terblokir secara permanen, kartu tidak dapat digunakan

5. Kolektibilitas Macet

Kolektibilitas Macet yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga dengan umur tunggakan lebih dari 270 hari.

Konsekuensi kolektibilitas macet :

- Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dilanjutkan
- Kartu terblokir secara permanen, kartu tidak dapat digunakan
- Pengalihan kegiatan penagihan ke pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan kolektibilitas tersebut dapat dijelaskan bahwa waktu dipakai sebagai ukuran (tepat waktu pembayaran) kolektibilitas piutang tersebut. Dengan demikian koperasi dapat menyusun jenjang kolektibilitas berdasarkan tetap waktu pembayaran pokok atau angsuran pokok, bunga, biaya-biaya, dan diterima kembali penanaman pada surat-surat berharga dan sebagainya.

2.3.5 Kebijakan Kolektibilitas Piutang

Kebijaksanaan kolektibilitas atau pengumpulan piutang merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengumpulkan piutang atas penjualan kredit yang diberikanya dalam waktu yang singkat.

Didalam usaha pengumpulan piutang, perusahaan harus berhati-hati agar tidak terlalu agresif dalam usaha-usaha menagih piutang dari para pelanggan. Bilamana langganan tidak dapat membayar tepat pada waktunya maka sebaiknya

perusahaan menunggu sampai jangka waktu tertentu yang dianggap wajar sebelum menerapkan prosedur-prosedur penagihan piutang yang sudah ditetapkan.

Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan merupakan suatu prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya bilamana sudah jatuh tempo. Perusahaan dapat melaksanakan kebijakan dalam pengumpulan piutangnya secara aktif maupun pasif dengan terlebih dahulu melihat latar belakang kemampuan finansial pelanggan yang diberikan kredit, sehingga dapat diputuskan cara penagihan yang tepat.

Sejumlah teknik penagihan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Melalui Surat

Bilamana waktu pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum juga dilakukan waktu pembayaran, maka perusahaan dapat melakukan pengiriman surat dengan nada “mengingat” (menegur) langganannya tersebut bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga bisa dibayar setelah beberapa hari surat tersebut dikirimkan, maka dapat dikirimkan surat kedua dengan nada yang lebih keras.

2. Melalui Telepon

Apabila setelah dikirimkan surat teguran ternyata hutang-hutang tersebut belum juga bisa dibayar, maka bagian kredit dapat menelpon langganan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil

pembicaraan tersebut ternyata misalnya pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai suatu jangka waktu tertentu.

3. Kunjungan Personal

Teknik penagihan piutang dengan jalan melakukan kunjungan personal atau pribadi ke tempat langganan. Cara ini seringkali digunakan karena dirasakan sangat efektif dalam proses penagihan piutang.

4. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata langganan tidak mau membayar hutang-hutangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

2.4 Hubungan Pengendalian Manajemen Dengan Kolektibilitas Piutang

Masalah yang umum dihadapi perusahaan ialah penagihan piutang yang telah jatuh tempo tidak selalu dapat diselesaikan seluruhnya. Jika keadaan itu terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka modal perusahaan akan semakin kecil. Dengan begitu penagihan piutang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius agar resiko yang mungkin timbul dapat dihindari sekecil mungkin. Dalam hal ini, pimpinan seharusnya juga turut aktif mengelola penagihan piutang agar tidak sampai menghambat operasi atau kegiatan perusahaan. Untuk mengantisipasi timbulnya piutang akibat tidak tertagihnya piutang, pihak perusahaan terlebih dahulu mengadakan evaluasi tentang keadaan atau kemampuan ekonomis calon peminjam. Tujuan dari pengendalian manajemen terhadap penagihan piutang yaitu untuk mengelola dan mengorganisir

piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau di konversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Pengendalian manajemen dalam kolektibilitas piutang dilakukan untuk menghindari risiko kecurangan yang terjadi pada piutang, seperti : kegagalan untuk menagih pelanggan, kesalahan dalam penagihan, pencurian kas, dan kinerja yang buruk.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir

2.5.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Friede Suranta Putra (2014) dengan judul “Analisis Kebijakan Manajemen Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah Pada Koperasi CU Sangapta Ras Desa Raya Berastagi” menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada CU Sangapta Ras Desa Raya Berastagi. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh pengurus koperasi serta anggota dari CU Sangapta Ras Desa Raya Berastagi agar tingkat kredit macet bisa dikurangi. Faktor ekstern yang bisa mempengaruhi kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet dapat diatasi dengan adanya sistem pengawasan atau pengendalian yang baik terhadap kredit macet.

Agustina Br Surbakti (2011) dengan judul “Peranan Pengendalian Manajemen Terhadap Kolektibilitas Piutang Pada Koperasi Credit Union (CU) Merdeka Desa Merdeka Kabupaten Karo” menunjukkan bahwa pengendalian

manajemen sangat berperan terhadap tingkat kolektibilitas piutang. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengendalian manajemen sangat efektif terhadap kolektibilitas piutang. Kolektibilitas piutang macet bahkan banyak kredit bermasalah maupun jatuh tempo, karena pinjaman tidak digunakan sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian pinjaman, usaha mengalami kerugian, pengurus kurang selektif dalam menerapkan tujuan pinjaman, kerajinan menabung, kemampuan mengembalikan pinjaman, prestasi masa lampau dan partisipasi dalam koperasi Credit Union Merdeka (TUKKEPAR), kesepelan anggota terhadap pinjamannya, dan naiknya harga kebutuhan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas maka dapat dikatakan pengendalian manajemen mempunyai pengaruh terhadap kolektibilitas piutang.

2.5.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat membuat suatu kerangka berpikir mengenai pengaruh pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang. Dari hasil penelitian Agustina Br Surbakti (2011) menunjukkan bahwa peran pengendalian manajemen sangat efektif terhadap kolektibilitas piutang.

Pengendalian manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengendalian manajemen perlu diperhatikan agar dapat mencapai tujuan koperasi yang efektif dan efisien. Pengendalian manajemen diharapkan berpengaruh terhadap kolektibilitas piutang pada koperasi.

Kolektibilitas piutang merupakan tingkat kemampuan pengembalian pokok pinjaman dan bunganya. Kolektibilitas piutang yang baik dapat mengurangi jumlah kredit bermasalah oleh sebab itu perlu adanya pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang. Semakin baik pengendalian manajemen maka tingkat pengembalian piutang semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka konseptual :

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual



2.6 Hipotesis Penelitian

Pengendalian manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana sedangkan kolektibilitas piutang merupakan tingkat kemampuan pengembalian pokok pinjaman dan bunganya.

Semakin baik pengendalian manajemen dalam suatu organisasi maka diharapkan tingkat pengembalian piutang semakin baik atau semakin meningkat.

Menurut Azuar dan Irfan: "**Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian**"¹⁷

Dalam penelitian ini, dirumuskan hipotesis yaitu:

H1 : Pengendalian manajemen mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kolektibilitas piutang.

¹⁷ Azuar dan Irfan, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**: Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013, hal 45.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari Penelitian ini yaitu pengendalian manajemen dan kolektibilitas piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Gunungsitoli, Jl. Merdeka No. 26 Tanjung Langkat, Jl. Kelapa No. 82 Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Fokus pembahasan diutamakan pada pengendalian manajemen, pemberian kredit dan kolektibilitas piutang.

3.2 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiyono: "**Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat**"¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Pengendalian Manajemen sebagai variabel independen (bebas) terhadap Kolektibilitas Piutang sebagai variabel dependen (terikat).

¹⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D**: Alfabet, Bandung 2016, hal. 37.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut sugiyono: "**Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya**".¹⁹

Sesuai dengan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus koperasi KSP3 Nias Cabang Gunungtitoli sebanyak 546 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono: "**Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi**".²⁰

Metode Pengambilan sampel adalah "*Sampling Purposive*". ***Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu**²¹.

Sampel adalah 5 orang pengurus dan 25 anggota KSP3 Nias Cabang Gunungtitoli yang memiliki kriteria :

1. Aktif melakukan simpanan selama periode 2016
2. Mengalami kredit bermasalah selama periode 2016

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ **Ibid.**, hal. 80

²⁰ Sugiyono, **Statistika untuk Penelitian**: Alfabet, Bandung, 2016, hal 62

²¹ **Ibid.**, hal. 68

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pelanggan berupa jawaban terhadap pertanyaan dalam kuesioner.
2. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa data tambahan dari perusahaan sebagai pelengkap dari data primer, antara lain seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, data kredit disalurkan dan data kredit macet.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data dengan mengunjungi perusahaan untuk meneliti dan melihat bagaimana keadaan pada perusahaan.
2. Metode survei yaitu pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan dalam bentuk tulisan (kuesioner) kepada pengurus dan anggota KSP3 Nias Cabang Gunungsitoli.

3.4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan peneliti.

Daftar pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut cukup terperinci dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup). Kuesioner ini diberikan kepada pengurus dan anggota KSP3 Nias Cabang Gunungsitoli yang mengalami kredit macet tahun 2016 untuk mengetahui tentang pengendalian manajemen terhadap kolektibilitas piutang pada koperasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang bertugas bagian pembukuan KSP3 Nias Cabang Gungungsitoli, untuk melengkapi keperluan data yang dibutuhkan peneliti. Data yang diminta dari perusahaan adalah sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, serta data lain yang berhubungan dengan judul objek penelitian.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian

Variabel	Definis	Indikator	Skala Pengukuran
Pengendalian Manajemen	1. Adanya penilaian dalam pemberian kredit. Merupakan suatu keputusan dimana seseorang / perusahaan akan memberikan kredit kepada pelanggannya.	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Condition</i> 4. <i>Colleteral</i>	Skala Likert
	2. Perencanaan Kredit mengetahui kendala atau peluang yang selanjutnya mendapat suatu kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat.	1. Tujuan melakukan pinjaman 2. Plafon kredit 3. Jangka waktu pinjaman 4. Pinjaman sesuai plafon.	Skala Likert
	5. Pengamanan Kredit Merupakan proses pengamanan yang berjalan terus-menerus, dan mengaitkan suatu kegiatan yang satu dengan yang lainnya.	1. Pengawasan kredit 2. Pembinaan anggota 3. Pengamanan kredit 4. Informasi data kredit debitur	Skala Likert

Kolektibilitas Piutang	6. Kebijakan Kolektibilitas merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengumpulkan piutang atas pinjaman yang diberikanya dalam waktu yang singkat	1. Melalui telepon 2. Melalui surat peringatan 3. Kunjungan Personal 4. Pemblokiran kartu 5. Tindakan Yuridis	Skala Likert
------------------------	---	---	--------------

3.5 Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Dengan menggunakan skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Dalam melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang akan diberi skor. Pemberi skor ini menggunakan lima tingkatan jawaban yaitu :

Tabel 3.2
Alternatif Jawaban Responden

No.	Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah ada, maka digunakan metode analisis sebagai berikut :

3.6.1 Statistik Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul, sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi.

3.6.2 Pengujian Kualitas data

3.6.2.1 Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner sebagai instrument penelitian dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui perhitungan kuesioner korelasi (*pearson correlation*).

Validitas instrument ditentukan dengan cara mengkolerasikan antara skor yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Instrument dapat dinyatakan valid apabila hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan koefisien korelasi 0,3 atau lebih. Instrument penelitian juga dapat dinyatakan valid jika tingkat signifikannya berada dibawah $\alpha = 0,05$

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reabilitas suatu pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrument yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Uji reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* suatu item dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data melalui analisa grafis yang dihasilkan dari perhitungan regresi dengan SPSS 22.

Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika tidak menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis sebagai berikut :

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 akan ditolak H_1 akan diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 akan diterima H_1 akan ditolak, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5 \%$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5 \%$

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi parsial terletak antara -1 hingga +1. Nilai R^2 yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang erat antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati +1 menunjukkan semakin erat hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R^2 parsial yang semakin mendekati angka nol menunjukkan kekuatan hubungan yang semakin lemah antara kedua variabel.